



RANJANGAN AKHIR
**RENCANA KERJA SATUAN
PERANGKAT DAERAH**

RENJA SKPD

**DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KAB. BATANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja Dinas Perindagkop dan UKM ini dilaksanakan guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Batang Tahun 2024 ini, diharapkan Disperindagkop dan UKM sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batang, 8 Juli 2024

KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN BATANG



WAHYU BUDI SANTOSO, S.SOS.M.M

Pembina utama muda
NIP. 1967010171990031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN UKM TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindagkop Tahun 2023 dan Capaian Renstra Disperindagkop dan UKM
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disperindagkop dan UKM
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang
- 3.3 Program dan Pendanaan

BAB RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDAGKOP IV DAN UKM

BAB V PENUTUP

Daftar Tabel

- Tabel Tc-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Disperindagkop dan UKM
- Tabel Tc-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM
- Tabel Tc-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Disperindagkop dan UKM
- Tabel Tc-32 Usulan Program dan Kegiatan Disperindagkop dan UKM dari Pemangku Kepentingan

Tabel Tc-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Disperindagkop dan UKM Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026

LAMPIRAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah mempertimbangkan berbagai permasalahan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Disperindagkop dan UKM

Penyusunan Rencana kerja Dinas perindustrian ,Perdagangan,koperasi dan UKM tahun 2023 Untuk melaksanakan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Opd Dinas Perindustrian ,Perdagangan,koperasi dan UKM Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan menentukan dalam memelihara kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu system perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan Perencanaan perbaikan kegiatan tahun yang telah dilaksanakan dan indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Untuk mengatasi isu-isu atau permasalahan yang dihadapi secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang .

1.2 Landasan Hukum

Dasar Landasan hukum penyusunan RENJA Perubahan SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
- PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- Permendagri No.77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
- Peraturan Bupati Batang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang.
- Peraturan Bupati Batang Nomor: 101 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas perindustrian ,perdagangan ,koperasi dan usaha kecil menengah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2021
- Peraturan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023
- Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2025 adalah sebagai dokumen acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2025 dalam mencapai indikator kinerja dan sasaran sesuai hasil evaluasi Renja pada triwulan I-IV tahun 2024.

- Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang dalam membantu penyelesaian permasalahan yang timbul di masyarakat dengan tugas pelayanan.
- Sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan dalam melakukan pengawasan dan peningkatan kinerja Disperindagkop dan UKM Kab. Batang.
- Sebagai dasar atau pedoman serta acuan dalam melaksanakan pembangunan agar sejalan dengan arah yang telah ditentukan .
- Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Disperindagkop dan UKM untuk pelaksanaan perubahan tahun 2023

1.3.2 Tujuan

Tujuan untuk disusunnya dokumen RENJA ini adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Semester kedua mendatang yaitu tahun 2025 Tujuan utama yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian ,Perdagangan Koperasidan UKM Pemerintah kab.Batang adalah :

- Sebagai tahapan dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2023
- Perbaikan- perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penyelesaian permasalahan dan isu yang timbul dalam tahun berjalan.
- Mengakomodir hasil rakorbang tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam tahun yang lalu dan tahun berjalan.
- Sebagai acuan Dinas Perindustrian ,Perdagangan Koperasi dan UKM kab Batang selama tahun 2023.
- Merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan tolak ukur dan target pembangunan Dinas Perindustrian ,Perdagangan Koperasi dan UKM kab Batang selama tahun 2023
- Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan perubahan rencana kerja tahun 2023.

1.4. Dasar Pertimbangan

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 Tentang Penyusunan Perubahan RKPD Disperindagkop dan UKM maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan ukm berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

rencana kerja Disperindagkop dan UKM tahun anggaran tahun 2025 dilakukan dengan memepertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam APBD Tahun 2025
2. Capaian target kinerja program dan kegiatan baik berkurang atau bertambah disebabkan karena kondisi dari penetapan target sebelumnya.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan evaluasi renja semester 1 tahun 2024 menjadi acuan untuk melakukan pada program/kegiatan/sub kegiatan, agar dapat tercapai sasaran dan indikator kinerja Dinas Perindustrian,Perdagangan,koperasi dan UKM

Berbagai pertimbangan diatas diperlukan untuk menentukan arah kebijakan dalam penyusunan rencana kinerja tahun 2025 dengan memperhatikan capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan adanya kebijakan nasional, maka arah kebijakan pembangunan kota Batang ditujukan untuk peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat Pemerintah

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasidan UKM Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

❖ Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA SKPD Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Batang Tahun 2025.

Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RENJA SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Disperindagkop serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.

Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang tahun 2023.

Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen.

❖ Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Disperindagkop dan UKM Tahun 2023

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2023 dan perkiraan rencana kerja Tahun 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Disperindagkop dan UKM tribulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan Keperasi dan UKM s/d tahun 2026

2.2 Evaluasi Program dan anggaran

Bagian ini menguraikan Program dan anggaran perubahan RENJA SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2023 dan evaluasi Renja terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2023.

❖ Bab III Tujuan, Sasaran Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Batang

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan.

3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang.

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan OPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

Bagian ini Bab ini menguraikan tentang rencana kerja program dan kegiatan serta pendanaan.

❖ Bab VI Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI dan UKM
TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja.

Pengukuran laporan kinerja ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia , maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik fisik maupun non fisik.
3. indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian.

1. Analisis Kinerja Output

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 12 (dua

belas) program dan 20 (Dua puluh) kegiatan dan 39 (tiga sembilan) subkegiatan yang telah dicanangkan pada tahun 2023 dan telah dilaksanakan dengan baik serta telah memberikan laporan akhir kinerja pada masing-masing kegiatan. Berdasarkan data-data yang ada, menunjukkan kinerja keluaran yang baik, yaitu capaian kinerjanya **100 %** jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mampu melaksanakan dan merealisasikan indikator kinerja dengan baik.

Sedangkan untuk Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 5 (limat) program dan 5 (Lima) kegiatan yang telah dicanangkan pada tahun 2023 dan telah dilaksanakan dengan baik serta telah memberikan laporan akhir kinerja pada masing-masing kegiatan. Berdasarkan data-data yang ada, menunjukkan kinerja keluaran yang baik, yaitu capaian kinerjanya **100 %** jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mampu melaksanakan dan merealisasikan indikator kinerja dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari kegiatan, bahwa semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah berusaha maksimal dan telah berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kebumen.

2. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efisiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program.

Pada Tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melaksanakan 12 (dua belas) program dan 20 (Dua puluh) kegiatan dan 39 (tiga sembilan) subkegiatan. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut

Berdasarkan realisasi keuangan hasil dari pelaksanaan 12(dua belas) program yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) kegiatan 39 (tiga sembilan puluh) subkegiatan telah melaporkan capaian kinerja keuangan sebesar **95,83 %** (Sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari Total Belanja yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 23.745.551.222 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) terealisasi sebesar Rp 22.771.307.737 (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batang Tahun 2023 merupakan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada Tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja.

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari evaluasi pencapaian kinerja pelayanan pada Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang telah melaksanakan capaian kinerjanya dengan cukup baik

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 program/kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan dengan indikator sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja 100 dengan anggaran Rp 7.123.059.248.- realisasi anggaran Rp 6.979.510.771,-, atau sebesar 97,98 %
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - d) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - e) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - f) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor (Keb)
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya(alat rumah tangga kantor)
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 110.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 109.906.000 ,- atau sebesar 99,91%

3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi dengan indikator Persentase koperasi aktif sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 55.000.000,-, dengan realisasi anggaran Rp 54.521.600,- atau sebesar 99,13 %
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan indikator persentase peserta pelatihan dengan predikat baik sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 314.848.250,- dengan realisasi anggaran Rp 310.352.900,- atau sebesar 98,57
5. Program Pemberdayaann Kemitraaan Usaha Mikro dengan indikator Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 44.640.400,- dengan realisasi anggaran Rp 44.558.400,- atau sebesar 98,57 %
6. Program Pengembangan Umkm dengan indikator persentase produk UMKM yang terstandarisasi sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 139.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 137.950.850,- atau sebesar 99,25%
7. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan indikator Jumlah Verifikasi Teknis sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 25.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 23.402.600,- atau sebesar 91,42%
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 3.367.858.624,- dengan realisasi anggaran Rp 3.301.285.124,- atau sebesar 98,02%
9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan indikator persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 133.450.000,- dengan realisasi anggaran Rp 121.247.460,- atau sebesar 90,82%
10. Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Nilai ekspor perdagangan sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 82.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp 72.450.000,- atau sebesar 87,81%
11. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 189.165.513 dengan realisasi anggaran Rp 188.537.040,- atau sebesar 99,67 %
12. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan indikator persentase peningkatan jumlah pelaku IKM sesuai dalam kelompok masukan dan keluaran; tepat dalam penetapan target kinerja dengan anggaran Rp 10.307.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 9.593.693.300,- atau sebesar 93,08 %

Untuk rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja
dan capaian Renstra sampai tahun 2023

Bidang Urusan : Perindagkop dan UKM

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d 2026	
1	2	3	4	6		11= 7+8+9+10		12 = 6+11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Pelaku Industri,Perdagangan dan koperasi								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian kinerja perindagkop dan ukm	Indeks	60	7.128.059.248	11	6.984.475.571	71	52.899.325.215
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60	5.000.000	11	4.964.800	71	35.100.000
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	60	5.000.000	11	4.964.800	71	35.100.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bln	60	7.123.059.248	11	6.979.510.771	71	44.539.138.947
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bln	48	7.084.319.248	11	6.940.805.971	59	43.932.702.947
1.2.2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		24	5.000.000	11	4.964.800	35	422.270.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kali	24	28.740.000	11	28.740.000	35	104.306.500
1.2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kali	1	90.000.000	50	89.704.200	36	179.859.500
1.2.4	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman Pegawai terhadap Peraturan perundang-undangan	kali	1	90.000.000	50	89.704.200	36	179.859.500
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah	60	479.925.838	11	479.512.859	71	2.731.471.184
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi	paket	48	35.000.000	11	34.995.200	59	195.000.200

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	48	86624100	11	86.616.100	59	60.322.600
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	paket	48	50.800.000	8	50.735.000	56	221.852.500
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	48	107.478.200	11	107.333.050	59	1.337.226.500
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	paket	48	5.400.000	11	5.400.000	59	27.200.000
1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	paket	48	-	2	-	50	163.030.000
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	48	194.623.538	11	194.433.509	59	726.839.384
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kali	60	495.295.980	11	486.610.100	71	212.246.500
1.4	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	paket	8	266.240.000	8	266.236.500	49	212.246.500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		35	229.055.980	35	220.373.600	35	220.373.600
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kali	60	488.944.500	11	465.135.718	71	927.082.646
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	paket	48	5.000.000	11	5.000.000	59	31.004.500
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	paket	48	393.432.000	11	369.665.518	59	622.895.896
1.5.3	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor (Keb)	tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor (Kebersihan)	paket	48	90.512.500	11	90.470.200	59	273.182.250
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kali	60	315.318.000	11	312.928.874	12	1.029.285.938
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	paket	48	58.190.000	11	55.847.984	12	79.779.386
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	paket	48	232.128.000	11	232.095.890	12	792.999.818
1.6.3	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	paket	48	2.000.000	11	2.000.000	12	54.975.000
1.6.4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya(alat rumah tangga kantor)	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya(alat rumah tangga kantor)		48	15.000.000	11	14.985.000	12	35.000.000

1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	paket	48	8.000.000	11	8.000.000	12	66.531.734
	Urusan Koperasi dan UKM								
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Indeks	75	110.000.000	181	109.906.000	256	576.481.000
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Umkm/kop	217	110.000.000	181	109.906.000	398	576.481.000
2.1.1	Pengawasan kekuatan ,kesehatan,Kemandirian,ketangguhan,serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah Pengawasan kekuatan ,kesehatan,Kemandirian,ketangguhan,serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan kab/kota	Umkm/kop	217	57.000.000	181	57.000.000	398	224.281.000
2.1.2	Pembinaan, pengawasan koperasi berprestasi	Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi	Umkm/kop	217	35.706.000	109	35.706.000	326	144.281.000
2.1.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Memonitor mengevaluasi dan Melaporkan kinerja Koperasi	Umkm/kop	973	17.294.000	72	17.200.000	1.045	77.200.000
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan		75	314.848.250	258	310.352.890	333	1.001.059.250
3.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian</i>	<i>Indeks</i>	<i>75</i>	<i>314.848.250</i>	<i>118</i>	<i>310.352.890</i>	193	<i>1.001.059.250</i>
3.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Org	400	138.888.800	118	138.888.800	518	477.238.800
3.1.2	Sosialisasi prinsip-2 perkoperasian	Sosialisasi perkoperasian	Koperasi	400	70.000.000	12	65.504.640	412	197.000.000
3.1.3	Bimbingan Tehnis Akuntansi Koperasi	jumlah koperasi yang mengikuti bintek	Koperasi	237	105.959.450	118	105.959.450	355	326.820.450
	program penilaian kesehatan koperasi								
4	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	presentase koperasi aktif	%		-	140	171.999.700	140	171.999.700
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah umkm yang mengikuti pelatihan	Umkm		-	140	171.999.700	140	171.999.700
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan		60	139.000.000	11	137.950.850	39	425.500.000

		Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
5.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	Terlaksananya pengembangan usaha mikro			139.000.000	39	137.950.850	39	425.500.000
5.1.1	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan izin usaha toko swalayan	pelatihan standarisasi produk	Kelompok		139.000.000	39	137.950.850	39	425.500.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, KECIL DAN USAHA MIKRO	Presentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		60	44.640.400	60,12	44.558.400	71	315.444.150
6.1	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Indeks</i>	25	44.640.400	78	44.558.400	103	315.444.150
6.1.1	Pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penetaan manajemen, standarisasi dan rekstruksisasi usaha koperasi dan kewenangan Kab/kota	Jumlah Pemberdayaan dan peningkatan produktifitas	ukm	17	44.640.400	12	44.558.400	458	315.444.150
6.1.2	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi	jumlah Pembinaan ukm	UKM	380	0	480	0	458	150.304.250
6.1.3	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi	Jumlah jaringan kerjasama koperasi	Koperasi/UMKM	205	0	205	0	340	165.139.900
	Urusan Perdagangan								
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pezinan dan pendaftaran perusahaan		48	21.000.000	11	45.778.000	59	85.778.000
7.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya penerbitan izin pasar rakyat, pusat perbelanjaan	dokumen	74	21.000.000	8	45.778.000	82	85.778.000

7.1.1	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah IKM yang mendapat izin	IKM	74	-	8	20.100.000	82	20.100.000
7.1.2	Fasilitas Penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah pelaku usaha yang pengajuan TDG	dokumen	1	20.000.000	11	17.358.000	12	37.358.000
7.1.3	Penerbitan Surat tanda waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah surat penerima waralaba	dokumen	1	1.000.000	11	8.320.000	12	28.320.000
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan		75	3.367.858.624	12	3.301.285.124	87	15.051.202.454
8.1	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Indeks</i>	75	2.709.588.824	12	2.685.024.174	87	14.048.627.454
8.1.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pembinaan yang dilaksanakan	kali/org	75	2.709.588.824	552	2.685.024.174	627	14.048.627.454
8.2	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	paket	60	658.269.800	11	616.260.950	71	1.002.575.000
8.2.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pasar rakyat yang representatif	lokasi	48	0	8	-	56	0
8.2.2	Fasilitas Pengelola Sarana dan Distribusi	jumlah fasilitas pengelolaan perdagangan	Lokasi	40	0	300		48	0
8.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar	Pemeliharaan selokan 8 pasar daerah	paket	100	658.269.800	24	616.260.950	124	1.002.575.000
8.2.4	Pengembangan pasar lelang daerah	jumlah fasilitasi lelang yang dilaksanakan	kali/lokasi	48	0	3	-	51	0
8.2.5	Pemberdayaan sarana distribusi perdagangan	Fasilitasi usaha dagang/ peralatan usaha	pkl	400	0	27	-	427	0
8.2.6	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Pembinaan organisasi/paguyuban pedagang kakilima dan asongan	bln/lokasi/kali	83	0	60	-	143	0
8.2.7	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	jumlah penyuluhan ketertiban dan Kebersihan pedagang pasar	bln/lokasi/kali	30	0	60	-	90	0
8.2.8	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Penataan PKL, Pedagang Pasar kembali ke Pasar Baru	bln/lokasi/kali	175	0	120		295	0

8.2.9	Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Fasilitasi usaha dagang/ peralatan usaha	bln/lokasi/kali	140	0	-	-	140	0
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pezinan dan pendaftaran perusahaan		48	25.600.000	11	23.402.600	59	85.778.000
9.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya penerbitan izin pasar rakyat,pusat perbelanjaan	dokumen	74	25.600.000	8	23.402.600	82	85.778.000
9.1.1	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah IKM yang memdapat izin	IKM	74	-	8	-	82	20.100.000
9.1.2	Fasilitas Penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah pelaku usaha yang pengajuan TDG	dokumen	1	20.000.000	11	18.358.000	12	37.358.000
9.1.3	Penerbitan Surat tanda waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah surat penerima waralaba	dokumen	1	5.600.000	11	5.044.600	12	28.320.000
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>presentase stabilisasi harga barang dan kebutuhan pokok penting lainnya</i>	<i>Indeks</i>	75	133.450.000	11	121.247.460	86	346.865.000
10.1	Menjamin Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat	<i>ketersediaan informasi pengendalian kebutuhan harga pokok dan barang penting lainnya</i>	<i>bln/kali</i>	75	45.200.000	11	38.742.500	86	208.190.000
10.1.1	Pengendalian Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Agen dan	<i>Pelaksanaan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	<i>bln/kali</i>	75	45.200.000	11	38.742.500	86	208.190.000
10.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	bln//kali		49.500.000	121	47.754.960	121	99.780.000
10.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	bln/kali		49.500.000	121	47.754.960	121	99.780.000

10.2.2	Pelaksanaan Operasi pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) daerah Kabupaten	Terlaksananya Operasi pasar/sidak	bln/kali	48	-	8	-	56	-
10.2.3	Peningkatan sistem dan jaringan informasi daerah	Tersedianya informasi harga pokok dan harga barang penting lainnya	bln/kali	48	-	11	-	59	-
10.2.4	Penyempurnaan perangkat peraturan, Kebijakan dan pelaksanaan operasionalisasi	Peningkatan Pendapatan Daerah	bln/kali	362	-	11	-	373	-
10.3	Pengawasan pupuk dan Pestisida di Bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	bln/kali	48	38.750.000	25	34.750.000	73	38.895.000
10.3.1	Pemeriksaan Kelengkapan legalitas Dokumen Perizinan	jumlah pemeriksaan kelengkapan perizinan	dokumen	60	27.250.000	25	24.500.000	85	645.000
10.3.2	Pengawasan penyaluran penggunaan pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah pengwasan penyaluran penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	kali	60	11.500.000	25	10.250.000	85	8.250.000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	nilai ekspor	Indeks	75	82.250.000	11	72.450.000	86	250.053.000
11.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan y		85	82.250.000	62	72.450.000	147	250.053.000
11.1.1	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	bln/kali	85	76.250.000	62	70.000.000	147	162003000
11.1.2	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah Penyelenggaraan Monitoring dan pendataan serta Pelaporan dari Perusahaan ekspor/impor, Disperindag Prov Jateng, Sucofindo Semarang	bln/kali	20	6.000.000	42	2.450.000	62	88.050.000
11.1.3	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Jumlah Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.	bln/kali	57	-	15	-	72	-
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN	Presentase standarisasi dan	Indeks	75	189.165.513	75	188.537.000	86	372.988.204

	PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>perlindungan konsumen</i>							
12.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	lokasi	15	179.325.513	11	178.827.000	15	343.984.102
12.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelkasanana tera yang ditera ulang	kali	15	9.840.000	257	9.710.000	704	29.004.102
12.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan tera	kali	15	0	43	0	58	0
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Presentase penggunaan dan pemasaran produk</i>	<i>Indeks</i>	48	0	11	-	59	-
13.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			-	2	-	2	-
13.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	bln/lokasi/kali		-	8	-	8	-
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Presentase perencanaan pembangunan industri</i>	<i>Indeks</i>	48	10.307.000.000	11	9.593.693.300	59	13.176.139.100
14.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	ikm	417	10.307.000.000	392	9.593.693.300	809	13.176.139.100
14.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	jumlah IKM yang difasilitasi Perijinan	ikm	98	250.000.000	57	246.691.000	155	296.611.667
14.1.2		Fasilitasi informasi, sertifikasi produk dan Banlat		90	0	132	0	222	161.416.667
14.1.3		fasilitasi ijin usaha industri	kelompok	100	0	32	0	132	124.861.666
14.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan rencana pembangunan	hibah uang kepada badan/lembaga,nirlaba,sukarela dan sosial	Kelompok	263	9.507.000.000	256	8.842.000.000	200	11.630.900.000
14.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pemberdayaan dan peran serta masyarakat	Pelatihan dan Banlat	kelompok	200	550.000.000	100	505.002.300	300	962.349.100
15	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	0,87	-	1,25	-	0,88	50.000.000,-

15.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan Keg Industri	Dokumen	12	-		-		-
15.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten	jumlah Data Industri ,IUI,IPUI, kawasan industri dalam Sinas	ikm	11000	-	11238	-	12238	-
15.1.2	Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	jumlah ikm yang difasilitasi Perijinan dalam sinas	ikm	11000	-	11238	-	12238	-
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase pengendalian izin usaha industri</i>	<i>Indeks</i>	0,87	-	1,25	-	0,88	50.000.000,-
16.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		12	-		-		-
16.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	TerFasilitasinya Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	ikm	11000	-	11238	-	12238	-
16.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	paket	11000	-	11238	-	12238	-

Sumber: Evaluasi Renja Perindagkop dan UKM Kabupaten Batang Tahun 2023 Triwulan IV

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 101 Tahun 2021 tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Kedudukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas adalah membantu Bupati urusan Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM adapun fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
5. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
6. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
7. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Disperindagkop dan UKM;
8. penyelenggaraan kesekretariatan Disperindagkop dan UKM; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Disperindagkop dan UKM, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
- f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan Disperindagkop dan UKM.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan Disperindagkop dan UKM;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Keuangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator Program. Subkoordinator merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.

1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Keuangan;
- d. menyiapkan dan menghimpun bahan untuk keperluan penyusunan anggaran di lingkup Disperindagkop dan UKM;
- e. menyusun rencana anggaran kegiatan Disperindagkop dan UKM;
- f. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
- g. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Disperindagkop dan UKM;

- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;

3) **Subkoordinator Program** pada Sekretariat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Program;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Program;
- d. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
- e. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- f. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
- g. menyusun program dan rencana kegiatan Disperindagkop dan UKM;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur,

memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perindustrian meliputi kegiatan pembangunan sumberdaya industri, sarana prasarana dan pemberdayaan industri.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perindustrian;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perindustrian;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sumberdaya industri;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan industri;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perindustrian; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Perindustrian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator. Subkoordinator merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan. Subkoordinator meliputi:

1) **Subkoordinator Pembangunan Sumberdaya Industri**, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- d. menyiapkan bahan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah;
- e. menyiapkan bahan pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan Daerah dan lintas Daerah;
- g. menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Daerah dan lintas Daerah;
- h. menyiapkan bahan perjanjian kerjasama di bidang industri;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi teknis dan fasilitasi pemberian perizinan bidang industri yang lokasinya di Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha serta pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) **Subkoordinator Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri**, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- d. menyiapkan bahan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah;
- f. melaksanakan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah;
- h. melaksanakan promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri di Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrollogian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perdagangan;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perdagangan;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan luar negeri;
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kemetrollogian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perdagangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator. Subkoordinator merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi:

1) Subkoordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- d. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e. melaksanakan pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- f. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota;
- g. melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- h. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- i. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- k. melaksanakan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- l. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- m. melaksanakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- n. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- q. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3 Kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah;
- r. melaksanakan penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
- s. melaksanakan pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- t. menyediakan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- u. melaksanakan Layanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- v. menyediakan pedoman pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);

- w. melaksanakan pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- x. melaksanakan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- y. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
- z. melaksanakan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- aa. melaksanakan pembinaan SIUP dan TDP;
- bb. melaksanakan identifikasi, pengembangan, dan promosi produk lokal/unggulan daerah;
- cc. melaksanakan identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- dd. melaksanakan peningkatan kemitraan usaha;
- ee. melaksanakan peningkatan akses pasar produk dalam negeri;
- ff. menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- gg. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; dan
- hh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) Subkoordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- d. melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- e. melaksanakan pemberian layanan informasi mengenai penyelenggaraan pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- f. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- g. melaksanakan penyusunan rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- h. melaksanakan pemberian layanan informasi mengenai partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- i. melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- j. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- k. melaksanakan pelaksanaan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- l. melaksanakan pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- m. melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- n. melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- o. melaksanakan pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensi daerah yang berorientasi ekspor;

- p. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor;
- q. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
- r. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- s. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- t. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- u. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3) Subkoordinator Kemetrologian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Kemetrologian;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Kemetrologian;
- d. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- e. melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke Pemerintah;
- f. melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- h. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- i. melaksanakan penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
- j. melaksanakan penyusunan SOP pelaksanaan pengawasan di wilayah Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- l. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
- m. menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- n. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima

Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan pasar dan PKL.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima;

- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan PKL;
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan retribusi pasar dan pedagang kali lima;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator. Subkoordinator merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima. Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan. Subkoordinator meliputi:

1) **Subkoordinator Pengelolaan Pasar**, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pengelolaan Pasar;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pengelolaan Pasar;
- d. menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pasar;
- e. melaksanakan inventarisasi pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana pasar;
- f. melaksanakan pengaturan tempat/lokasi pedagang dan barang dagangan;
- g. melaksanakan pengendalian keamanan, ketertiban dan penyelesaian perselisihan antara sesama pedagang pasar;
- h. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan, pembinaan kesadaran hak, kewajiban dan penegakan hukum bagi pedagang pasar;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan ketertiban pedagang pasar;
- j. melaksanakan dan membina kemitraan dengan paguyuban pedagang pasar;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebersihan, keamanan dan penggunaan sarana prasarana pasar;
- l. memfasilitasi pemenuhan jaringan/instalasi sarana prasarana pasar;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Pasar;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) **Subkoordinator Pengelolaan Pedagang Kali Lima**, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan, pembinaan kesadaran hak, kewajiban dan penegakan hukum bagi pedagang kaki lima;
- e. menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pedagang kaki lima;
- f. melaksanakan inventarisasi pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana pedagang kaki lima;
- g. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pedagang kaki lima;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebersihan, keamanan dan penggunaan sarana prasarana pedagang kaki lima;
- i. melaksanakan pendataan aset dan inventarisasi program pedagang kaki lima;
- j. memfasilitasi pemenuhan jaringan/instalasi sarana prasarana pedagang kaki lima;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan ketertiban pedagang kaki lima;
- l. melaksanakan dan membina kemitraan dengan paguyuban pedagang kaki lima;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- 3) **Subkoordinator Pengelolaan Retribusi Pasar dan Pedagang Kaki Lima**, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pengelolaan Retribusi Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pengelolaan Retribusi Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
 - d. merencanakan dan melaksanakan penghitungan retribusi pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
 - e. menyusun petunjuk teknis pembinaan bagi para wajib bayar retribusi pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi penerimaan retribusi;
 - g. menyiapkan bahan penerbitan surat ijin pemanfaatan kios/los pasar dan ijin lainnya yang berada di lingkungan pasar dan pedagang kaki lima;
 - h. melaksanakan intensifikasi, pengendalian retribusi, penagihan dan pembukuan pasar dan pedagang kaki lima;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penerimaan pendapatan Daerah yang berasal dari pasar dan pedagang kaki lima;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Retribusi Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan kelembagaan, perijinan, keanggotaan, penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi serta pemberdayaan, pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelembagaan, perijinan, keanggotaan dan penerapan peraturan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi;
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator yang merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan. Subkoordinator meliputi:

- 1) **Subkoordinator Kelembagaan, Perijinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan,** mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Kelembagaan, Perijinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Kelembagaan, Perijinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 - d. melaksanakan analisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - e. melaksanakan analisa dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - f. melaksanakan analisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - g. melaksanakan analisa berkas pembubaran koperasi;
 - h. menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - i. melaksanakan analisa data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - j. melaksanakan analisa penerapan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan analisa penerapan sanksi bagi koperasi;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan, Perijinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) **Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi;** mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - d. menyusun bahan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - e. menyusun data penilaian koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - f. menyusun data kesehatan simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - g. menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - h. menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) **Subkoordinator Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro,** mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - e. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan koperasi;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - h. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - i. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - j. menganalisa data izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - k. menyiapkan bahan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - m. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan perangkat organisasi koperasi;
 - n. menyiapkan bahan pengembangan kewirausahaan; dan
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

C. HAMBATAN

- a. Hambatan dan kendala yang terjadi pada lingkup teknis/ fisik kegiatan ikut mempengaruhi pencapaian target anggaran/ keuangan;
- b. Kekurang cermatan dalam penyusunan anggaran pada rekening kegiatan tertentu mengakibatkan pencapaian target anggaran/ keuangan kurang maksimal;
- c. Adanya beberapa jenis rekening yang sulit diprediksi, sehingga perhitungan anggaran untuk rekening tersebut sulit untuk tepat sesuai dengan kebutuhan/ realisasi;
- d. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan pada akhir tahun serta penambahan anggaran di Perubahan APBD 2023 mengakibatkan kurang optimalnya capaian target kinerja keuangan pada kegiatan tersebut;
- e. Adanya beberapa kegiatan fisik yang dipihak ketigakan yang penurunan nilai kontraknya jauh dibawah pagu anggaran mengakibatkan pencapaian target anggaran/keuangan kurang maksimal.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Pemerintah Kabupaten Batang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target		Target	Realisasi
A	Koperasi dan UKM									
1	Prosentase Koperasi Aktif	%	78	78,72	80	78,99	94	94.57	65	65.85
2	Prosentase Koperasi sehat terhadap KSP	%	45	57,87	50	57,87	61	61.71	45.21	51.21
3	Jumlah Usaha Mikro Kecil	Unit	105.900	102.512	105800	105.875	105.700	105.965	105.970	106.105
4	Jumlah Wira Usaha Baru	%	50	130	50	100	50	135	50	140
5	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan Permodalan	Orang	NA	130	NA	140	NA	100	Na	100
6	Pengembangan Klaster Bisnis (OVOP)	Klaster	1	8	1	1	1	1	Na	1
7	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Kali	2	2	3	3	3	180	3	7
8	Peningkatan Jaringan kerjasama antar lembaga	Kali	1	2	1	3	1	1	1	1
9	Memfasilitasi Peningkatan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan menengah	Orang	NA	12	NA	12	NA	5	Na	3
10	Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan	Orang	360	130	360	140	360	1	50	70
11	Pelatihan Managemen Pengelolaan Koperasi	Orang	120	90	120	80	120	15	25	37
12	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Orang	150	829	150	229	150	105	100	115
13	Bimbingan Tehnis Akuntansi Koperasi	Orang	150	80	150	80	150	79	50	70
14	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Orang	120	0	120	0	120	209	100	205

15	Sosialisasi prinsip-2 perkoperasian	Orang	150	200	150	220	150	50	50	105
16	Pembinaan, pengawasan koperasi berprestasi	Orang	150	77	150	86	150	115	50	150
17	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi	Orang	140	0	140	0	140	140	50	70
18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Orang	150	823	150	229	150	230	150	205
19	Bimbingan teknis kelembagaan Koperasi		150	90	150	80	150	155	90	126
20	Penilaian kesehatan KSP/USP	Orang	90	67	90	86	90	115	90	115
B										
21	Revitalisasi Pasar	pasar	2	0	2	2	1	7	4	5
22	Penataan PKL/pedagang		Na	179	Na	189	Na	125	Na	78
23	Presentase perizinan/rekomendasi sesuai ketentuan	Orang	Na	459	Na	579	NA	769	Na	
24	Jumlah Pemantuan harga barang dan barang yang beredar	laporan	Na	95	Na	110	Na	120	250	
25	Jumlah Pupuk bersubsidi yang disalurkan (Urea NPK,Petrogonik,Za,Sp36	Jumlah Realisasi pupuk bersubsidi	Na	17.957.920	Na	20.246.816	Na	11.240.521		
26	Laporan harga barang kebutuhan melalaui informasi Kepokmas dan Sistem informasi harga kemendag	Jumlah laporan	Na	8	Na	8	Na	12	Na	60
27	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitasi promosi dagang	Jumlah	Na	80	Na	85	Na	235	Na	127
28	Jumlah Pelaku Usaha memperoleh pelatihan / fasilitas peningkatan ekspor	Jumalh	Na	80	Na	85	Na	80	Na	38
29	Jumlah Penangan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan	Na	1	Na	1	Na	12	Na	0

30	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	3.236.491.000	3.278.334.240	3.709.212.660	3.806.363.572	4.500.000.000	5.341.051.074	5.870.000.000	5.965.712.230
31	Jumlah Nilai ekspor bersih	USD	56.742.336	12.205.200 56	56.742.336	52.037.256	56.742.335	57.877.188	57.877.183	68.080.380
32	Kontribusi sektor Perdagangan (ADHB)	%	15.19	15,5	15,17	14,31	12.40	14.13	12.36	
34	Pertumbuhan Industri	%	0,9	0,86	0,9	0,99	0,9	0,98	0.87	1.25
35	Jumlah Raperda RIPIK	Jumlah	Na	0	Na	1	Na	1	Na	1
36	Jumlah Perusahaan Industri besar dan Perusahaan kawasan Industri dalam sinas	Jumlah		0	Na	6	Na	86	Na	87
37	Kontribusi sektor Industri (ADHB)	%	30.02	34,43	30.02	33,31	30,63	33,31		

Sumber: Capain Perindagkop dan UKM Kabupaten Batang
Tahun 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Disperindagkop dan UKM , serta untuk meraih tujuan organisasi, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik faktor internal maupun eksternal. Dengan melakukan analisis terhadap lingkungan, dalam hal ini menggunakan analisis SWOT, maka dapat diketahui bahwa faktor lingkungan internal meliputi: *Strenght* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), sedangkan faktor lingkungan eksternal meliputi: *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala).

Melalui metode analisis SWOT, yakni memperhitungkan *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan/kendala), Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) serta faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam perencanaan

Tabel 2.3
Analisis SWOT
Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang

<i>Strenght</i> (kekuatan)	<i>Opportunity</i> (peluang)
Telah ditetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Kabupaten Batang dan Peraturan Bupati Batang Nomor 101 Tahun 2021 yang memberikan Kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab.	Adanya kebijakan dan komitmen para stakeholder di Kabupaten Batang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, kreatif dan normatif , Adanya komitmen dan hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman
UUD TH 45 psl 33 ,UU No. 20 thun 2008 pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	Adanya dukungan dari pemerintah (Dinas Koperasi dan UMKM), Sarana dan prasarana yang memadai, Kemajuan teknologi untuk mempermudah mendapatkan dan menyebarkan informasi, UMKM yang berjumlah banyak dan beragam
Berkembangnya kawasan Industri menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM dan penyerapan tenaga kerja, Potensi wisata yang menjadikan Batang sebagai daerah Tujuan Wisata sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif	Masuknya kawasan BIP dan KITB (perusahaan pengelola kawasan industri seluas 4.300 hektar yang akan menciptakan tenaga kerja dan invstasi di Kabupaten Batang. Kreativitas sebagai modal dasar pengembangan produk industri yang inovatif.
<i>Weakness</i> (kelemahan)	<i>Threat</i> (kendala)

Masih kurangnya pemahaman sebagian ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Batang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Rendahnya SDM ASN terhadap peningkatan kualitas pelayanan
Daerah Pegunungan sehingga menyulitkan pembinaan secara merata ,Sebagian besar Pelaku usaha/ SDM yang pendidikannya rendah,keterbatasan anggaran	Rendahnya partisipasi pemuda untuk menjadi anggota koperasi,Anggota pasif Koperasi Pemuda lebih banyak daripada anggota yang aktif, Modal yang mampu diputar relatif kecil dan kesulitan modal dalam pengembangan unit usaha,kemampuan manajerial pengurus kurang memadai,Daya saing yang lemah karena belum ada kekhasan usaha yang dikelola
Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah DIY yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional,Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar, dan Perlindungan	Lemahnya Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektualproduk industri kreatif

Selama kurun waktu tahun 2023, faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang adalah kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, sedangkan faktor lingkungan eksternal yang dominan adalah adanya tuntutan untuk menerapkan *good governance* dan *clean government* dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi.

Analisis internal

1. Adanya kebijakan dan komitmen para stakeholder di Kabupaten Batang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif ,kreatif dan normative
2. Adanya peraturan perundang-undangan dan berbagai petunjuk teknis sebagai pedoman bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tusi
3. Adanya kerjasama dan hubungan yang harmonis antar Pemerintah Kabupaten Batang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain,Provinsi dan Pusat

Ancaman

1. Tingginya harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Tingginya keterbukaan informasi publik melalui berbagai media
3. Meningkatnya pengawasan dan kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

Strategis

1. Peningkatan koordinasi dan hubungan kerja antar Unit Kerja dan SKPD

2. Pengoptimalkan perumusan produk hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Pengefektifan , efisien, dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. untuk peningkatan kualitas pelayanan

Sedangkan faktor lingkungan eksternal

Analisis eksternal

1. Persaingan yang semakin tinggi di era pertumbuhan dunia usaha perdagangan bebas
2. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar dan
3. Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM

Ancaman

1. Persaingan yang semakin tinggi di era pertumbuhan dunia usaha perdagangan bebas
2. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar dan Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM
3. Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah Batang yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional,

Strategis

1. Perkuat pembinaan pelatihan, pendampingan ,promosi produk ,pemberian bantuan dan perlindungan dengan program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM),Program Pengembangan Umkm
2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif dan Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas dan penyediaan kawasan industri

Permasalahan Utama yang Dihadapi Disperindagkop dan UKM

Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan internal maupun eksternal. Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi terkait kebijakan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan umum.
- b. Belum efektif, efisien, dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. untuk peningkatan kualitas pelayanan
- c. Peningkatan dan penguatan Kemitraan ,Koperasi sehat dan usaha mikro yang manpu berdaya saing
- d. Peningkatan , penguatan sarana dan prasaran perdagangan
- e. Mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan berdaya saing melalui pemantauan distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting
- f. Memberikan fasilitasi promosi dagang dalam dan luar negeri, Meningkatkan kemitraan usaha antara eksportir besar dengan menengah dan kecil
- g. Meningkatkan efektifitas pendaftaran perusahaan secara online melalui pengembangan pendaftaran perusahaan secara online dan melalui Online Single Submission (OSS, Peningkatan data industri dan kawasan industri integrasi sektor pendukung urusan industry

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah atau upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan public Peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan public.
- b. Peningkatan dan penguatan Kemitraan ,Koperasi sehat dan usaha mikro yang manpu berdaya saing
- c. Peningkatan , penguatan sarana dan prasaran perdagangan
- d. Mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan berdaya saing melalui pemantauan distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting
- e. Memberikan fasilitasi promosi dagang dalam dan luar negeri, Meningkatkan kemitraan usaha antara eksportir besar dengan menengah dan kecil
- f. Meningkatkan efektifitas pendaftaran perusahaan secara online melalui pengembangan pendaftaran perusahaan secara online dan melalui Online Single Submission (OSS, Peningkatan data industri dan kawasan industri integrasi sektor pendukung urusan ind

Adapun mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Batang adalah sebagai berikut

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-	-2	-3	-4	-5	-6
	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH						DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				
00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bat ang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokume n	10.200.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bat ang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.200.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/b ulan	6.371.809.5 00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bul an	6.371.809.5 00

00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	5.000.000	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	5.000.000
00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	4 Laporan	28.740.000,00	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	4 Laporan	28.740.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				112.100.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				112.100.000,00
00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	207 Paket	62.100.000,00	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	207 Paket	62.100.000,00
00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000,00	-		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah				440.034.31 3,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah			440.034.31 3,00
00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	35.000.100,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket 35.000.100,00
00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	86.615.750,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket 86.615.750,00
00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	42.000.000,00	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket 42.000.000,00
00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100.000.000,00	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket 100.000.000,00
00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.400.000,00	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen 5.400.000,00
00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171.018.463,00	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan 171.018.463,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				338.508.70 0,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				338.508.70 0,00
00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	323.508.70 0,00	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	323.508.70 0,00
00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000, 00	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000, 00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				536.838.00 0,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				536.838.00 0,00
00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	5.500.000,0 0	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	5.500.000,0 0
00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	433.476.00 0,00	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	433.476.00 0,00

00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.862.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.862.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				313.784.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				313.784.000,00
00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	42.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	42.000.000,00
00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	206.784.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	206.784.000,00
00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				

		-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	15.000.000,00	-		-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	15.000.000,00
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				62.942.650,00		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				62.942.650,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				62.942.650,00		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				62.942.650,00
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	62.942.650,00		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	62.942.650,00

	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				35.000.000, 00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				35.000.000, 00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000, 00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000, 00
00 03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	13 Unit Usaha	35.000.000, 00	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	13 Unit Usaha	35.000.000, 00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN				125.885.30 0,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN				125.885.30 0,00

	PERKOPERASIAN					PERKOPERASIAN				
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				125.885.30 0,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				125.885.30 0,00
00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	125.885.30 0,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	125.885.30 0,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				54.230.000, 00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				54.230.000, 00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				54.230.000, 00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				54.230.000, 00

00 09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			12 Bulan 0	54.230.000, 00	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			12 Bulan 0	54.230.000, 00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				417.879.05 0,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				417.879.05 0,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				417.879.05 0,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				417.879.05 0,00
00 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	208.613.40 0,00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	208.613.40 0,00

00 15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	209.265.65 0,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	209.265.65 0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				15.000.000, 00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				15.000.000, 00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				15.000.000, 00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				15.000.000, 00
00 02	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	90 Unit Usaha	15.000.000, 00	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	90 Unit Usaha	15.000.000, 00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.457.074.9 00,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.457.074.9 00,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.882.074.9 00,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.882.074.9 00,00

	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				25.000.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				25.000.000,00
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				25.000.000,00	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				25.000.000,00
00 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	25.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.568.819.900,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.568.819.900,00

	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				800.000.00 0,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				800.000.00 0,00
00 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	800.000.00 0,00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	800.000.00 0,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				2.768.819.9 00,00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				2.768.819.9 00,00
00 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	134/12 Dokumen	2.768.819.9 00,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	134/12 Dokumen	2.768.819.9 00,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				117.750.00 0,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				117.750.00 0,00

	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				39.500.000,00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				39.500.000,00
00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	39.500.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	39.500.000,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				45.000.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				45.000.000,00
00 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	45.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	45.000.000,00

	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				33.250.000,00	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				33.250.000,00
0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	33.250.000,00	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	33.250.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				60.505.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				60.505.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.505.000,00	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.505.000,00
0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	60.505.000,00	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	60.505.000,00

	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				105.000.00 0,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				105.000.00 0,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				105.000.00 0,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				105.000.00 0,00
00 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	85.000.000, 00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	85.000.000, 00
00 02	Pengawasan/Peny uluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Orang	20.000.000, 00	Pengawasan/Peny uluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Orang	20.000.000, 00
	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				5.000.000,0 0	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				5.000.000,0 0
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				5.000.000,0 0	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				5.000.000,0 0

00 05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25 UMKM	5.000.000,0 0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25 UMKM	5.000.000,0 0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				575.000.00 0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				575.000.00 0,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				475.000.00 0,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				475.000.00 0,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				475.000.00 0,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				475.000.00 0,00
00 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	150.000.00 0,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	150.000.00 0,00
00 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana	120 Dokumen	25.000.000, 00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	120 Dokumen	25.000.000, 00

	Prasarana Industri		dan Prasarana Industri			Prasarana Industri				
00 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	300.000.00 0,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	300.000.00 0,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				50.000.000, 00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				50.000.000, 00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000, 00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000, 00

00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	50.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				50.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				50.000.000,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00

00 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	
----------	---	--	--	---------------	---------------	---	--	--	---------------	--

2.4 penelaah usulan program dan kegiatan musrenbang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/ Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kabupaten. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/ kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait. Selanjutnya dari semua usulan program/ kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bapelitbang.

Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum Perangkat Daerah dan juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025, maka ditetapkan Renja Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang tahun 2025.

Pada tahun 2025, tidak ada Usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari Para Pemangku Kepentingan, adapun mekanisme pengusulannya dari Perangkat Daerah Renja Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang tahun 2025.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiat	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan RPJM Nasional tahun 2023-2026 merupakan tahapan ke IV Tahun I pencapaian visi misi RPJP Nasional tahun 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :

“Memantapkan pembangunan Kabupaten Batang secara komperhensif di berbagai bidang pembangunan dengan menekankan pada pencapaian derajat kualitas sumberdaya manusia, pencapaian Kualitas pelayanan pemerintah, pencapaian Kemandirian daerah, dan pencapaian daya saing komoditas unggulan daerah.

Industri, perdagangan Koperasi dan UKM adalah bagian dari Pembangunan Nasional, sehingga pembangunan industri dan perdagangan harus mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi maupunsosial politik. Oleh karenanya dalam penentuan tujuan pemabangunan sektor industri perdagangan koperasi dan UKM jangka waktu menengah bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan disektor industri perdagangan koperasi dan UKM saja yang disebabkan oleh lemahnya daya saing, tetapi juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional seperti :

- 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan
- 2) Rendahnya pertumbuhan ekonomi
- 3) Melambatnya perkembangan ekspor
- 4) Lemahnya sektor infrastruktur
- 5) Berubahnya kualitas SDM dan tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi
- 6) Deversifikasi usaha dan sistem distribusi

Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

- 1) Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- 2) Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
- 3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), maka kebijakan dan langkah strategis Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan Money Follow Program;
- 2) Penerapan Kebijakan Berbasis Data;
- 3) Optimalisasi koordinasi, asistensi dan monitoring evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Pengembangan Jaringan Kolaboratif kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi non-profit dalam bentuk kemitraan riset.

3.1.2 TUJUAN

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025, Tema Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah "Pemantapan Kondisi Sosial Ekonomi Didukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Optimalisasi Sektor Pariwisata" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

- 1) Perwujudan Kondusivitas wilayah;
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 3) Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri pariwisata;
- 4) Pemantapan kualitas infrastruktur dasar
- 5) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batang serta tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1.2 SASARAN

Sasaran yang telah direncanakan pada RPJMD tahun 2023-2026 oleh Pemerintah daerah Kabupaten Batang Disperindagkop yaitu

Meningkatnya kecakapan dan kemandirian pemuda dalam berwirausaha

- 1. Meningkatnya akses permodalan, kualitas dan daya saing koperasi serta UMKM;
 - 2. Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang;
 - 3. Meningkatnya Produktivitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan;
- Sasaran tersebut dijabarkan dalam Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM sebagai berikut :
- 1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri
 - 2. Meningkatnya kontribusi PDRB sektor Industri
 - 3. Meningkatnya kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi local serta pengembangan industry kreatif
 - 4. Meningkatnya Prosentase Koperasi Aktif
 - 5. Meningkatnya kontribusi PDRB sektor Perdagangan
 - 6. Meningkatnya Nilai Ekspor perdagangan
 - 7. Meningkatnya penataan Pasar yang baik dan reprenstatif (Bersih dan tertata).

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang

Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan									Target Akhir
									RPJMD/
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja	Target per Tahun					RPD/
				2022	2023	2024	2025	2026	Renstra
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Kualitas Koperasi	Presentase Koperasi aktif	Formulasi: (jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	65	65	68	68	70	70
			Tipe Perhitungan: %						
			- Sumber Data:						
2.	Meningkatnya daya saing UMKM	Presentase Produk UMKM	Formulasi: Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) :Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) X 100	15	15	15	20	20	20
			Tipe Perhitungan: %						
			- Sumber Data:						

3.	Meningkatnya pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	- Formulasi:	0,01	0,078	0,078	0,079	0,080	0,080
			jumlah pelaku IKM tahun n- jumlah pelaku IKM tahun n-1dibagi (jumlah pelaku IKM tahun n-1)×100						
			- Sumber Data:						
4.	Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri PDRB(ADHB)	Persentase perdagangan besar, kecil, reparasi mobil dan sepeda motor	- Formulasi:	12,22	12,36	12,75	13,24	13,36	13,36
			Jumlah Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dibagi total PDRB)×100						
			Sumber Data: BPS Kabupaten Batang						
5.	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Disperidagkop dan UKM	Nilai saki	Formulasi:	68	66	67	68	68	68

3.2
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang Penetapan Anggaran Tahun 2025 merencanakan 16 program dalam 22 kegiatan dan 38 sub kegiatan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang. Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor (Keb)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya(alat rumah tangga kantor)

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan kekuatan ,kesehatan,Kemandirian,ketangguhan,s erta Akuntabilitas Koperasi kewenangan kab/kota
			Pembinaan, pengawasan koperasi berprestasi
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Sosialisasi prinsip-2 perkoperasian
			Bimbingan Tehnis Akuntansi Koperasi
4	PROGRAM PENILAIAN KOPERASI		
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM,dan izin usaha toko swalayan
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,KECIL DAN USAHA MIKRO		
		Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan peningkatan produktifitas ,nilai tambah ,akses pasar ,akses pembiayaan ,penguatan kelembagaan ,penetaan manajemen ,standarisasi dan rekstruksisasi usaha koperasi dan kewenangan Kab/kota
			Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi
			Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	

		yang Keanggotaannya dalam Daerah	
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
			Fasilitas Penerbitan tanda daftar gudang
			Penerbitan Surat tanda waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitas Pengelola Sarana dan Distribusi
			Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar
			Pengembangan pasar lelang daerah
			Pemberdayaan sarana distribusi perdagangan
			Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
		Menjamin Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat	Pengendalian Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Agen dan
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Operasi pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) daerah Kabupaten

			Peningkatan sistem dan jaringan informasi daerah
			Penyempurnaan perangkat peraturan, Kebijakan dan pelaksanaan operasionalisasi
		Pengawasan pupuk dan Pestisida di Bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan legalitas Dokumen Perizinan
			Pengawasan penyaluran penggunaan pupuk dan Pestisida bersubsidi
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
			Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
			Pembangunan promosi perdagangan internasional
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri

		Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan rencana pembangunan
			Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Rencana Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
15	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten
			Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
16	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DISPERINDAGKOP DAN UKM
TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target Akhir Periode Renstra OPD	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
	2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				9.003.242.930,00			
1	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah cakupan layanan operasional kantor	96,95% 92% 92% 5,8% 96,95% 96,95% 92% 92% 5,8% 96,95%	5,7 % 92 % 96,81 %	8.321.535.930,00			
	2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	4 Dokumen 4 Dokumen	10.200.000,00			
	2	17	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Batang, Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.858.701.530,00			
	2	17	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		70 Orang/bulan	6.824.961.530,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	28.740.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	25.000.000,00			
	2	17	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		207 Paket	0,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							

						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	25.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	257.503.700,00			
	2	17	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 Paket	35.103.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	75.000.700,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	42.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100 Paket	100.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2	17	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Batang, Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	338.508.700,00			
	2	17	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		50 Unit	323.508.700,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	0,00	Kab. Batang, Batang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	15.000.000,00	Kab. Batang, Batang, Kasepuhan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	536.838.000,00			
	2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2000 Laporan	5.500.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100 Laporan	433.476.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	97.862.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	294.784.000,00			
	2	17	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		65 Unit	42.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		65 Unit	206.784.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2	17	01	2.09	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		100 Unit	20.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	26.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	-	10.000.000,00			
	2	17	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.000.000,00			
	2	17	02	2.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		15 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

3	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	-	62.942.650,00			
	2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	62.942.650,00			
	2	17	03	2.01	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		30 Unit Usaha	62.942.650,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- PK2UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	-	20.375.700,00			
	2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	20.375.700,00			
	2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan							

						Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		13 Unit Usaha	20.375.700,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-	125.885.300,00			
	2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	125.885.300,00			
	2	17	05	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		60 Orang	125.885.300,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- PK2UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	-	29.624.300,00			
	2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	29.624.300,00			
	2	17	06	2.01	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota							

						0			12 Bulan 0	29.624.300,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	-		417.879.050,00			
	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-		417.879.050,00			
	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		40 Unit Usaha	208.613.400,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UMK	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	07	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		60 Orang	209.265.650,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	

8	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	-	15.000.000,00			
	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	-	15.000.000,00			
	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro							
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		90 Unit Usaha	15.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.729.932.763,00			
	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.416.932.763,00			
9	3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	152.555.727,00			
	3	30	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	152.555.727,00			
	3	30	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	152.555.727,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
10	3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	-	22.400.000,00			

	3	30	02	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	-	22.400.000,00			
	3	30	02	2.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
						Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		6 Dokumen	22.400.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
11	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	-	3.003.522.036,00			
	3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	600.000.000,00			
	3	30	03	2.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		5 Unit	600.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	-	2.403.522.036,00			
	3	30	03	2.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							

						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		134/12 Dokumen	2.403.522.036,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	-	107.950.000,00			
	3	30	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	34.700.000,00			
	3	30	04	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12 Laporan	34.700.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	-	40.000.000,00			
	3	30	04	2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

	3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	33.250.000,00			
	3	30	04	2.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							
						Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		12 Laporan	33.250.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
13	3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	25.505.000,00			
	3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	25.505.000,00			
	3	30	05	2.01	Peningkatan Citra Produk Ekspor							
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		6 Produk	25.505.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
14	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	-	95.000.000,00			
	3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan	-	-	-	95.000.000,00			

					Pengawasan							
	3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		500 Unit	75.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	30	06	2.01	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		20 Orang	20.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
15	3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	10.000.000,00			
	3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	10.000.000,00			
	3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		25 UMKM	10.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.313.000.000,00			
16	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN	-	-	-	5.263.000.000,00			

					PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	5.263.000.000,00			
	3	31	02	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		10 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		125 Dokumen	4.963.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		10 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
17	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	-	25.000.000,00			

	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	25.000.000,00			
	3	31	03	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
						-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		12 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	-	25.000.000,00			
	3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	25.000.000,00			
	3	31	04	2.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							

						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
--	--	--	--	--	--	---	--	------------	---------------	--	--------------------------------------	---

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang tahun 2025 Merencanakan mengajukan dana APBN dan APBD. Usulan tersebut sesuai tupoksi dan disesuaikan Permendagri no 90 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan :

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja : Tersedianya laporan akuntabilitas Kinerja pemerintah dan laporan akhir tahun

Target Capaian kinerja : Laporan LkjIP, LPPD dan paket laporan keuangan 2021
Kebutuhan Dana : Rp. 10.200.000,-

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Target Capaian kinerja : 12 Bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 6.371.809.500,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Target Capaian kinerja : 12 Bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 5.000.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Target Capaian kinerja : 12 Bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 28.740.000,00

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Target Capaian kinerja : 1 paket kegiatan Laporan LkjIP, LPPD dan paket laporan keuangan 2021
Kebutuhan Dana : Rp. 62.100.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi/bintek
Target Capaian kinerja : 12 Bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 50.000.000,00

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Target Capaian kinerja	: 12 Bulan
Kebutuhan Dana	: Rp. 35.000.100,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target Capaian kinerja	: 12 Bulan
Kebutuhan Dana	: Rp. 86.615.750,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target Capaian kinerja	: 12 Bulan
Kebutuhan Dana	: Rp. 42.000.000,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kinerja	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Target Capaian kinerja	: 12 Bulan
Kebutuhan Dana	: Rp. 100.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
Target Capaian kinerja	: 12 Bulan
Kebutuhan Dana	: Rp. 5.400.000,-

1.5 Penyedia Jasa Penunjang urusan daerah lainnya

Penyediaan Jasa surat menyurat

Indikator Kinerja	: Tersedianya sarana penunjang pelayanan untuk surat-menyurat administrasi perkantoran
Target Capaian kinerja	: 12 bulan
Kebutuhan Dana	: Rp. 5.200.000,-

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Indikator Kinerja	: Lancarnya komunikasi, penerangan dan tersediannya air bersih
Target Capaian kinerja	: 12 bulan
Kebutuhan Dana	: Rp. 433.476.000,-

Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja	: Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor
Target Capaian kinerja	: 12 bulan
Kebutuhan Dana	: Rp. 97.862.000,-

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja	: Terlaksananya penyediaan peralatan dan mesin kantor
Target Capaian kinerja	: 12 bulan
Kebutuhan Dana	: Rp. 323.508.700,-

Pengadaan pembangunan Gedung kantor

Indikator Kinerja	: terlaksananya pembangunan kanopi/ Gedung kantor
-------------------	---

Target Capaian kinerja : 12 bulan
 Kebutuhan Dana : Rp. 15.000.000,-

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
 Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
 Target Capaian kinerja : 12 bulan
 Kebutuhan Dana : Rp. 42.000.000,-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan
 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : belanja bahan bakar, pelumas dan suku cadang alat angkut
 Target Capaian kinerja : 12 bulan
 Kebutuhan Dana : Rp. 206.784.000,-

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
 Target Capaian kinerja : 12 bulan
 Kebutuhan Dana : Rp. 50.000.000,-

Pemeliharaan asset tetap lainnya

Indikator Kinerja : Tersedianya Pemeliharaan asset tetap lainnya
 Target Capaian kinerja : 12 bulan
 Kebutuhan Dana : Rp. 15.000.000,-

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi

Indikator Kinerja : Kesehatan Koperasi
 Capaian kinerja : 1 tahun
 Kebutuhan Dana : Rp. 62.942.650,1-

3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM, Koperasi

Indikator Kinerja : tercapainya Jumlah Pemahaman tentang koperasi
 Capaian kinerja : 1 paket
 Kebutuhan Dana : Rp. 125.885.300,-

4. Program Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan
 Capaian kinerja : 1 paket
 Kebutuhan Dana : Rp. 35.000.000

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Koperasi

Indikator Kinerja : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 Capaian kinerja : 1 tahun
 Kebutuhan Dana : Rp. 110.451.000
 0.000,-

6. Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,
 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para
 Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja : Jumlah Kemitraan usaha umkm
 Capaian kinerja : 1 paket

Kebutuhan Dana : Rp. 208.613.400.-

7. Program Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator Kinerja : meningkatnya Fasilitas usaha UMKM

Capaian kinerja : 1 paket

Kebutuhan Dana : Rp. 15.000.000,-

8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Penerbitan Izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Indikator Kinerja : Meningkatnya kepatuhan Perizinan pelaku usaha

Capaian kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp 25.000.000,-

9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program penunjang urusan

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana

Capaian kinerja : 1 Paket

Kebutuhan Dana : Rp. 800.000.000,-

Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Indikator Kinerja : terpenuhinya Pembinaan sarana distribusi perdagangan

Capaian kinerja : 1 Paket

Kebutuhan Dana : Rp. 2.768.819.900,-

10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat, yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Indikator Kinerja : Penyediaan Kebutuhan bahan pokok dan ketertiban pelaku usaha, kenyamanan berusaha,

Capaian kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp 117.750.000,-

11. Program Pengembangan Ekspor

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Indikator Kinerja : Peningkatnya sumber daya dan produk ekspor

Capaian kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 60.505.000,-

12. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Indikator Kinerja : Terlaksanya Tera dan pengawasan tera/tera ulang

Capaian kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 105.000.000,-

13. Program Penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja : Terlaksanya Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk

Capaian kinerja : 1 tahun

Kebutuhan Dana : Rp. 5.000.000,-

14. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator Kinerja : Peningkatan sumber daya industri
 Capaian kinerja : 1 tahun
 Kebutuhan Dana : Rp.150.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator Kinerja : Peningkatan sarana prasarana industri
 Capaian kinerja : 1 tahun
 Kebutuhan Dana Rp.25.000.000,

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator Kinerja : Meningkatnya kualitas SDM bagi IKM
 : Terfasilitasinya merk dagang dan label halal
 Capaian kinerja : 1 Paket
 Kebutuhan Dana : Rp.300.000.000

15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sector perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
 Capaian kinerja : 1 tahun
 Kebutuhan Dana : Rp.50.000.000

16. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Penerbitan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 Capaian kinerja : 1 tahun
 Kebutuhan Dana : Rp.50.000.000

Tabel 4.1

Tc-33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan,Perangkat Daerah Tahun 2025,Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
No Kode	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH						13.325.026.413,00			14.358.330.903,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.867.951.513,00			9.850.320.008,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						8.867.951.513,00			9.850.320.008,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.157.014.513,00			9.119.181.455,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.200.000,00			10.710.000,00
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	10.200.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.710.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.405.549.500,00			7.078.157.008,00
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	70 Orang/bulan	-	6.371.809.500,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	7.042.730.008,00
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

		-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	4 Laporan	-	5.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	5.250.000,00
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	4 Laporan	-	28.740.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	30.177.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						112.100.000,00			117.705.000,00
0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	207 Paket	-	62.100.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	207 Paket	65.205.000,00
0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	50 Orang	-	50.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	52.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						440.034.313,00			466.935.047,00
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	10 Paket	-	35.000.100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	36.750.105,00
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

		-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5 Paket	-	86.615.750,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	90.955.305,00
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5 Paket	-	42.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	44.100.000,00
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	100 Paket	-	100.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	105.000.000,00
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	-	5.400.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.670.000,00
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	-	171.018.463,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	184.459.637,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						338.508.700,00			564.750.000,00
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	50 Unit	-	323.508.700,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	343.500.000,00
0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-	1 Unit	-	0,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	205.500.000,00

			Disediakan					Disediakan		
0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	-	15.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.750.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						536.838.000,00			551.614.200,00
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2000 Laporan	-	5.500.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	5.760.000,00
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	100 Laporan	-	433.476.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	446.254.200,00
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	-	97.862.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	99.600.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						313.784.000,00			329.310.200,00
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	65 Unit	-	42.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	43.937.000,00
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

		-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	65 Unit	-	206.784.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	217.123.200,00
0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
		-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	100 Unit	-	15.000.000,00	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	15.750.000,00
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	-	50.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	52.500.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						62.942.650,00			66.100.000,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						62.942.650,00			66.100.000,00
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
		-	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	30 Unit Usaha	-	62.942.650,00	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	66.100.000,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						35.000.000,00			21.394.486,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00			21.394.486,00
0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan									
		-	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	-	13 Unit Usaha	-	35.000.000,00	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	13 Unit Usaha	21.394.486,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						125.885.300,00			132.179.565,00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						125.885.300,00			132.179.565,00
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									

		-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	60 Orang	-	125.885.300,00	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	132.179.565,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						54.230.000,00			56.941.500,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						54.230.000,00			56.941.500,00
0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota									
		-	0	-	12 Bulan 0	-	54.230.000,00	0	12 Bulan 0	56.941.500,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						417.879.050,00			438.773.002,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						417.879.050,00			438.773.002,00
0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
		-	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-	40 Unit Usaha	-	208.613.400,00	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	219.044.070,00
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
		-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	60 Orang	-	209.265.650,00	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	219.728.932,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						15.000.000,00			15.750.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						15.000.000,00			15.750.000,00
0002	Pengembangan Usaha Mikro									
		-	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	90 Unit Usaha	-	15.000.000,00	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	90 Unit Usaha	15.750.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.457.074.900,00			4.508.010.895,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.882.074.900,00			3.983.010.895,00
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						25.000.000,00			26.500.000,00

	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						25.000.000,00			26.500.000,00
0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
		-	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	6 Dokumen	-	25.000.000,00	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	26.500.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						3.568.819.900,00			3.642.260.895,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						800.000.000,00			840.000.000,00
0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
		-	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-	5 Unit	-	800.000.000,00	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	840.000.000,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						2.768.819.900,00			2.802.260.895,00
0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
		-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	134/12 Dokumen	-	2.768.819.900,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	134/12 Dokumen	2.802.260.895,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						117.750.000,00			130.500.000,00
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						39.500.000,00			42.000.000,00
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									

		-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	12 Laporan	-	39.500.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	42.000.000,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						45.000.000,00			47.500.000,00
0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
		-	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	12 Laporan	-	45.000.000,00	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	47.500.000,00
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						33.250.000,00			41.000.000,00
0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									
		-	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	12 Laporan	-	33.250.000,00	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	41.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						60.505.000,00			63.000.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.505.000,00			63.000.000,00
0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor									
		-	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-	6 Produk	-	60.505.000,00	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	63.000.000,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						105.000.000,00			115.500.000,00

	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						105.000.000,00			115.500.000,00
0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
		-	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	500 Unit	-	85.000.000,00	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	94.500.000,00
0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
		-	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	20 Orang	-	20.000.000,00	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Orang	21.000.000,00
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						5.000.000,00			5.250.000,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						5.000.000,00			5.250.000,00
0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
		-	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	25 UMKM	-	5.000.000,00	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25 UMKM	5.250.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						575.000.000,00			525.000.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						475.000.000,00			420.000.000,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						475.000.000,00			420.000.000,00
0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									
		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	10 Dokumen	-	150.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	105.000.000,00
0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									

		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	120 Dokumen	-	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	120 Dokumen	0,00
0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	10 Dokumen	-	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	315.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						50.000.000,00			52.500.000,00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00			52.500.000,00
0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota									
		-	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	12 Dokumen	-	50.000.000,00	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	52.500.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						50.000.000,00			52.500.000,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00			52.500.000,00
0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									

		-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	12 Dokumen	-	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	52.500.000,00
							13.325.026.413,00			14.358.330.903,00

BAB V

Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang Tahun 2025 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan tahunan daerah. menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta sub kegiatan pada dokumen rencana kerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja perubahan 2025 sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan.

Demikianlah Renja (RKPD) yang dapat disusun berdasarkan masukan yang telah dikoordinasikan, mudah-mudahan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dapat melaksanakan Perubahan rencana kerja ini dengan baik. Kepada instansi terkait dan masyarakat mohon kerjasamanya agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

Batang, 25 Juli 2024

KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN BATANG


WAHYU RIZKI SANTOSO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002

Lampiran- lampiran :